

**Judul** : Konflik Nepal meluas, siapkan evakuasi cepat, jaga keselamatan WNI  
**Tanggal** : Jumat, 12 September 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Konflik Nepal Meluas

## Siapkan Evakuasi Cepat, Jaga Keselamatan WNI



**Taufiq Abdullah**

ANGGOTA Komisi I DPR Taufiq Abdullah berharap konflik yang terjadi di Nepal tidak sampai mengorbankan warga Indonesia yang berada di sana. Pemerintah diminta melakukan segala upaya perlindungan WNI di Nepal, termasuk menyiapkan langkah mitigasi hingga evakuasi jika diperlukan.

"Kami berharap situasi segera kondusif, tapi jika keadaan semakin tidak menentu dan mengancam keselamatan WNI, maka langkah evakuasi perlu dipersiapkan dengan tepat waktu," saran Taufiq dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025).

Diketahui, berdasarkan data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), terdapat 57 WNI yang bermukim di Nepal. Selain itu, ada 43 anggota Delegasi RI yang sedang menghadiri konferensi, 2 anggota TNI yang mengikuti pelatihan, serta 23 wisatawan yang sedang berlibur di negara tersebut.

Taufiq meminta Pemerintah memberikan fasilitasi penuh dan menjalin komunikasi secara intensif dengan seluruh WNI di Nepal maupun pihak-pihak terkait untuk memastikan keselamatan mereka. "Seluruh WNI di Nepal agar tetap tenang dan senantiasa berkoordinasi dengan KBRI," imbau politikus PKB ini.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenuh) menyiapkan langkah-langkah strategis. Mengingat, situasi saat ini cukup mengancam keselamatan WNI yang berada di Nepal, baik dalam kapasitas diplomatik, pendidikan, maupun kegiatan sosial dan ekonomi. "Pemerintah harus mengedepankan keselamatan WNI," tegasnya.

Menurut Dave, Pemerintah harus segera mengambil langkah yang cepat dan terkoordinasi. Termasuk, penguatan komunikasi dengan perwakilan RI di lapangan, pemetaan potensi ancaman terhadap WNI, hingga kesiapan prosedur evakuasi.

"Kami mengimbau masyarakat Indonesia yang berada di Nepal untuk tetap menjaga ketenangan, meningkatkan kewaspadaan, dan tidak mengambil risiko yang dapat membahayakan diri," ucapnya.

Komisi I DPR, kata Dave, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap langkah-langkah Pemerintah dalam merespons situasi di Nepal. Namun, perlu adanya kebijakan yang diambil bersifat cepat dan tepat.

"Kondisi di Nepal semoga segera kembali kondusif agar keamanan dan ketertiban masyarakat, baik lokal maupun internasional dapat terjaga secara menyeluruh," harap Dave.

Sebagai informasi, demonstrasi berujung keributan terjadi di Nepal pada Selasa (9/9/2025). Massa mengamuk membakar gedung DPR, gedung pemerintah, rumah politikus hingga menyerang sejumlah menteri.

Saat ini, Nepal masih dilanda kekosongan pemerintahan setelah Presiden Ram Chandra Poudel mengundurkan diri, menyusul lengsernya mantan Perdana Menteri Jhlanath Khanal. Tercatat sedikitnya 20 orang tewas dan hampir 400 orang luka-luka akibat konflik yang telah menyebar ke berbagai wilayah negara itu. ■ TIF